

AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) FUNGSIONAL KEPUSTAKAWANAN : TINJAUAN DATA ALUMNUS DIKLAT CALON PUSTAKAWAN TINGKAT AHLI (CPTA) TAHUN 2011 S.D TAHUN 2019

Mamat Ramlan, S.IP

A. LATAR BELAKANG

Membaca Road Map Perpustakaan Nasional RI 2015 – 2019, Indonesia sampai saat ini masih mengalami kekurangan tenaga fungsional pustakawan, diperkirakan masih dibutuhkan kurang lebih **356.049** orang pustakawan untuk memenuhi kebutuhan tenaga fungsional pustakawan dalam skala nasional. Kebutuhan tersebut memang cukup beralasan mengingat jumlah pustakawan yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan jumlah perpustakaan yang ada saat ini. Berdasarkan data jumlah perpustakaan dalam skala nasional sudah mencapai 154.359 buah perpustakaan terdiri, Perpustakaan Sekolah (121.187 perpustakaan), Perpustakaan Perguruan Tinggi (2.428 perpustakaan), Perpustakaan Umum (23.611 Perpustakaan), dan Perpustakaan Khusus (7.132 perpustakaan). Pusat data pada Pusat Pengembangan Pustakawan, Perpustakaan Nasional RI (Per-Mei 2019) melaporkan bahwa jumlah tenaga fungsional pustakawan saat ini sudah mencapai 3356 orang pustakawan yang terdiri dari Pustakawan Keterampilan berjumlah 1140 orang dan Pustakawan Keahlian berjumlah 2216 orang yang tersebar ke berbagai jenis perpustakaan diantaranya, **Perpustakaan Nasional RI (387 orang), Pustakawan Sekolah (131 orang), Pustakawan Perpustakaan Perguruan Tinggi (1362 orang), Pustakawan Perpustakaan Khusus (408 orang) , Pustakawan Perpustakaan**

Umum Kab/Kota (332 orang). Berdasarkan data tersebut tentunya dapat kita bayangkan bahwa kondisi dunia kepustakawanan kita belum terjadi sinkronisasi antara jumlah pustakawan dengan jumlah kebutuhan perpustakaan yang ada sampai saat ini. Seyogianya diperlukan upaya kita bersama untuk terciptanya harmonisasi dan eksistensi kepustakawanan kita.

Tugas Perpustakaan Nasional RI sebagai instansi pembina terhadap pengelolaan perpustakaan di Indonesia memiliki peran strategis dalam mengatasi kebuntuan atas problematika kepustakawanan Indonesia saat ini. Pasal 21 Undang-Undang No. 43 tentang Perpustakaan dikatakan bahwa “ Perpustakaan Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan”. Salah satu tugas utamanya adalah sebagai instansi pembina di bidang pengelolaan perpustakaan. Untuk itu sudah sepantasnya menciptakan fungsi perpustakaan yang dapat berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat merupakan tujuan utama dari program Perpustakaan Nasional RI. Menciptakan fungsi perpustakaan yang berfungsi bagi masyarakat tidaklah semudah membalik telapak tangan. Mengingat fungsi perpustakaan yang utama adalah sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan kebudayaan

bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 43 tentang Perpustakaan merupakan cita-cita kita bersama dalam mewujudkan Indonesia cerdas.

Menciptakan fungsi perpustakaan yang berfungsi tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni (profesional) dalam bidang kepastakawanan. Karena pengelolaan sumber daya manusia yang tepat merupakan salah satu unsur penting bagi kemajuan dan perkembangan organisasi. Penguatan profesionalisme kepastakawanan saat ini sudah tersirat pada pasal 30 Undang-Undang No 43 Tentang Perpustakaan “Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum pemerintah, perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum kabupaten/kota dan perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan” dalam pasal tersebut sangat jelas bahwa kompetensi sumber daya manusia sudah menjadi tumpuan terpenting dalam tata kelola organisasi.

B. PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pada prinsipnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan suatu proses pembelajaran dalam organisasi yang mengarah pada perubahan sikap dan perilaku pegawai memenuhi harapan kualifikasi kerja dan tuntutan perkembangan organisasi baik internal maupun eksternal. Kebutuhan pendidikan dan pelatihan muncul karena adanya masalah-masalah yang mengganggu pada kinerja organisasi, seperti penurunan prestasi yang mencakup menurunnya pelayanan, menurunnya tingkat produktivitas.

Moekijat (1993:2) menjelaskan tujuan umum pelatihan sebagai berikut: 1) Untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif; 2) Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga

pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional; 3) Untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman (rekan kerja) dan dengan manajemen (pimpinan). Selanjutnya menurut Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana (1995:223) manfaat pelatihan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan serta meningkatkan kualitas dan produktivitas organisasi secara keseluruhan, dengan kata lain tujuan pelatihan adalah meningkatkan kinerja dan pada gilirannya akan meningkatkan daya saing.

Konsep Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh para PNS dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk menurut *Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*, menetapkan bahwa jenis Diklat yaitu antara lain **DIKLAT Prajabatan** dan **DIKLAT Dalam Jabatan**. Pelatihan dalam Jabatan meliputi : 1). Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim), 2). Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, 3). Pendidikan dan Pelatihan Teknis. Sedangkan Diklat Fungsional adalah bentuk pendidikan dan pelatihan yang dilakukan untuk memberikan bekal pengetahuan dan/ atau keterampilan bagi para Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional. Jenjang jabatan fungsional meliputi :

1. Diklat fungsional keahlian yang merupakan bentuk diklat yang memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu dan terkait langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan.
2. Diklat fungsional keterampilan yang merupakan bentuk diklat yang memberikan pengetahuan dan keterampilan fungsional tertentu dan terkait langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan.

C. DIKLAT KEPUSTAKAWANAN

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) merupakan unit kerja daripada Perpustakaan Nasional RI memiliki tugas organisasi sebagai penyelenggara dan pelaksana pendidikan dan pelatihan di bidang perpustakaan mempunyai peran yang penting untuk menciptakan kompetensi sumber daya manusia di bidang perpustakaan. Pendidikan dan Pelatihan bidang perpustakaan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas kepustakawanan. Berdasarkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional No. 39 Tahun 2001 rincian Diklat Kepustakawanan tersebut, terdiri atas :

1. **Diklat Fungsional Pustakawan** meliputi Diklat Penyetaraan dan Diklat penjurangan Jabatan Fungsional Pustakawan
2. **Diklat Teknis Kepustakawanan** antara lain Diklat Tenaga Pengelola Perpustakaan, Diklat Pelestarian Bahan Pustaka, Diklat Otomasi Perpustakaan, Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah, Diklat Pengenalan Perpustakaan dll.

Diklat Fungsional Pustakawan merupakan program Diklat bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi kewajiban akan jabatan fungsional pustakawan. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pustakawan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Perpustakaan Nasional RI merupakan program diklat fungsional dengan tujuan menjaring bagi pegawai (PNS) untuk dapat diangkat menjadi pejabat fungsional pustakawan. Menurut Peraturan KepMenpan dan RB Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya menegaskan bahwa pendidikan seseorang (PNS) dapat diangkat menduduki jabatan fungsional pustakawan **keterampilan**

serendah-rendahnya berijazah Diploma (D2) di bidang ilmu perpustakaan atau di bidang ilmu lain serta untuk menduduki jabatan fungsional pustakawan **keahlian** serendah-rendahnya berijazah Sarjana (S1) di bidang ilmu perpustakaan atau di bidang ilmu lain dengan syarat mengikuti dan lulus diklat fungsional pustakawan. Adapun kategori Diklat Fungsional Pustakawan meliputi *Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli (CPTA)*, *Diklat Pustakawan Tingkat Ahli (Alih Jalur)* dan *Diklat Calon Pustakawan Tingkat Terampil (CPTT)*.

D. DIKLAT CALON PUSTAKAWAN TINGKAT AHLI (CPTA)

Penyelenggaraan diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli (CPTA) merupakan bentuk pembinaan pemerintah (Perpustakaan Nasional RI) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam memberikan solusi atas kebuntuan profesi pustakawan yang belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Diharapkan dengan kebijakan penyelenggaraan Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli (CPTA) mampu berkontribusi lebih besar dalam mencetak para calon pustakawan yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas jumlah jabatan fungsional pustakawan di Indonesia.

Penyelenggaraan Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli (CPTA) adalah merupakan diklat penyetaraan fungsional pustakawan yang memiliki persyaratan tertentu antara lain calon peserta merupakan Pegawai Negeri Sipil serta minimal pendidikan sarjana (S1) non perpustakaan.

E. PEMBAHASAN

Dalam tulisan ini, penulis paparkan bahwa jumlah lulusan peserta diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli selama sembilan (9) tahun terakhir terhitung dari tahun 2011 s.d 2019 berjumlah **614 orang** dengan indeks rata-rata prestasi sangat memuaskan. Sedangkan indeks ketidakberhasilan peserta atau tidak lulus mencapai 5 orang dari kontestasi keseluruhan peserta yang

mencapai **619** orang. Adapun factor – factor penyebab ketidak lulusan peserta antara lain factor kesehatan, kurangnya kedisiplinan peserta, serta nilai yang tidak memenuhi persyaratan untuk standar kelulusan.

Setelah Penulis melakukan telaah data terhadap data lulusan peserta diklat kepustakawanan tahun anggaran 2011 s.d 2019 , maka penulis dapat mengidentifikasi data lulusan peserta Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli sebagai data akuntabilitas penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan sebagai berikut :

1. Lulusan Diklat Kepustakawanan 2011 s.d 2018

Tabel 1. Jumlah Lulusan Diklat Kepustakawanan 2011 s.d 2018

No	Tahun Anggaran	Diklat Fungsional			Diklat Teknis	Jumlah
		CPTA	Alih Jalur	CPTT		
1	2011	56	30	-	283	372
2	2012	120	30	-	315	465
3	2013	88	30	-	347	465
4	2014	89	30	-	500	619
5	2015	90	-	-	376	466
6	2016	85	-	-	355	440
7	2017	30	17	-	839	886
8	2018	29	-	-	1138	1167
	Jumlah	590	137	0	4153	4880

Berdasarkan data table, jumlah alumnus Diklat kepustakawanan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Perpustakaan Nasional RI terhitung dari tahun 2011 s.d 2018 sudah mencapai jumlah 4880 orang peserta. Lulusan Diklat fungsional pustakawan berjumlah 727 orang peserta sedangkan lulusan Diklat teknis kepustakawanan berjumlah 4153 orang peserta. Dapat disimpulkan bahwa jumlah lulusan diklat teknis kepustakawanan (85.10%) lebih besar daripada jumlah lulusan diklat fungsional pustakawan hanya (14.89 %). Pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Pustakawan Tingkat Ahli (Alih Jalur) tidak sepenuhnya dilaksanakan secara rutin setiap tahun anggaran, tidak seperti halnya

dengan Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun anggaran. Adapun pelaksanaan Diklat Calon Pustakawan Tingkat Terampil (CPTT) selama periode 2011 s.d 2018 belum sama sekali diselenggarakan sebagai bagian dari program integritas diklat fungsional pustakawan (0%). Lulusan peserta Diklat merupakan bagian penting dan merupakan indikator kinerja utama daripada Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

2. Jumlah Kelulusan Peserta Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli (CPTA)

Tabel 2. Tingkat Lulusan Peserta Diklat CPTA

No	Tahun Pelaksanaan	Jumlah Alumni	Persentase %
1	2011	59	9.6
2	2012	120	19.5
3	2013	88	14.3
4	2014	89	14.4
5	2015	90	14.6
6	2016	85	13.8
7	2017	30	4.8
8	2018	29	4.7
9	2019	24	3.9
	Jumlah	614 Peserta	

Lulusan Peserta Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli (CPTA) selama periode tahun 2011 s.d 2019 mencapai 614 orang peserta yang diikuti oleh berbagai jenis perpustakaan yang ada di Indonesia. Jumlah lulusan Diklat CPTA pada setiap tahun anggaran mengalami jumlah yang fluktuatif artinya selalu berubah. Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang kebijakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui **penyesuaian/Inpassing** banyak berdampak pada kebijakan pelaksanaan Diklat CPTA khususnya dalam kurun 3 tahun terakhir. Sehingga terjadi penurunan jumlah lulusan peserta Diklat CPTA yang cukup signifikan. Penurunan tersebut dapat kita lihat pada **tabel 2**, grafik menunjukkan bahwa terjadi penurunan selama 3 tahun

terakhir (2017 s.d 2019) jika kita urut dengan tahun-tahun sebelumnya. Diklat CPTA merupakan program diklat unggulan diklat fungsional pustakawan yang telah banyak mencetak para pustakawan di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Penurunan tersebut tentunya sudah menjadi kekhawatiran kita bersama artinya dengan terjadinya penurunan dikhawatirkan akan mengalami stagnasi aspek kualitas maupun kuantitas jumlah pustakawan skala nasional.

3. Lulusan Peserta Diklat CPTA Berdasarkan Pada Jenis Perpustakaan

Tabel 3. Lulusan pada jenis perpustakaan

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah	Prosentase %
1	Perpustakaan Nasional	85	13.84
2	Perpustakaan Umum	134	21.82
3	Perpustakaan Perguruan Tinggi	217	35.34
4	Perpustakaan Sekolah	43	7.0
5	Perpustakaan Khusus	135	21.98

Berdasarkan Undang – Undang No. 43 Tentang Perpustakaan pasal 20 bahwa Perpustakaan terdiri dari Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus. Populasi lulusan peserta Diklat CPTA masa periode 2011 s.d 2019 mencapai 614 orang peserta yang tersebar ke berbagai jenis perpustakaan yang ada. Sebaran lulusan peserta Diklat CPTA berdasarkan tabel diatas (Tabel 3), sebaran lulusan peserta Diklat CPTA meliputi : **Perpustakaan Nasional RI** sebagai Perpustakaan Pembina 13.84 % (85 orang peserta), **Perpustakaan Umum Kab/Kota** 21.82 % (134 orang peserta), **Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri** 35.34 % (217 orang peserta), **Perpustakaan Sekolah SMP/SLTA** mencapai 7 % (43 orang peserta), **Perpustakaan Khusus** mencapai 21.98 % (135 orang peserta).

Tabel diatas menunjukkan bahwa populasi jumlah lulusan Diklat CPTA berasal dari Perguruan Tinggi memiliki jumlah lulusan yang paling tinggi mencapai

(35.34 %) atau 217 orang peserta jika kita perbandingkan dengan jumlah lulusan daripada jenis perpustakaan lainnya. Senada dengan data Pusat Pengembangan Pustakawan, Perpustakaan Nasional RI (Mei 2019) bahwa jumlah jabatan fungsional pustakawan di Perguruan Tinggi menempati jumlah pustakawan paling tinggi mencapai 40.58 % atau 1362 orang. Berdasarkan data, ketersediaan pustakawan saat ini : *Perpustakaan Sekolah (313 orang), Perpustakaan Perguruan Tinggi (1362 orang), Perpustakaan Khusus (408 orang), Perpustakaan Umum Prop/kab/kota (1068 orang) dan Perpustakaan Nasional RI (387 orang)*.

Lain halnya pada perpustakaan sekolah jumlah fungsional pustakawan masih perlu adanya upaya agar jumlah fungsional pustakawan pada perpustakaan sekolah mengalami peningkatan. Berdasarkan data, jumlah fungsional pustakawan pada perpustakaan sekolah saat ini berjumlah 313 orang atau 9.3 % dari seluruh jumlah pustakawan (3356 orang) yang ada pada setiap jenis perpustakaan. Jumlah tersebut tentunya jauh dari harapan apabila kita bandingkan dengan jumlah kebutuhan perpustakaan sekolah yang sudah mencapai 121.187 perpustakaan sekolah. Senada dengan usaha Perpustakaan Nasional RI dalam meningkatkan jumlah pustakawan di perpustakaan sekolah adalah dengan memberikan kesempatan bagi perpustakaan sekolah untuk mengikuti Diklat fungsional pustakawan. Berdasarkan laporan bahwa jumlah lulusan peserta Diklat CPTA yang berasal dari perpustakaan sekolah pada periode 2011 s.d 2019 mencapai 43 orang. Jumlah tersebut merupakan jumlah lulusan yang paling rendah dari jumlah lulusan pada setiap jenis perpustakaan.

4. Pemetaan Berdasarkan Propinsi

Tabel 4. Lulusan Tingkat Propinsi

No	Provinsi	Jumlah	Prosentase %
1	Aceh	13	2.11
2	Bali	34	5.53
3	Banten	10	1.62
4	Bengkulu	7	1.14
5	DKI Jakarta	127	20.68
6	Gorontalo	3	0.48
7	Jambi	10	1.62
8	Jawa Barat	54	8.79
9	Jawa Tengah	46	7.49
10	Jawa Timur	43	7.0
11	Kalimantan Barat	7	1.14
12	Kalimantan Selatan	6	0.97
13	Kalimantan Tengah	5	0.81
14	Kalimantan Timur	4	0.65
15	Kepulauan Bangka Belitung	3	0.48
16	Lampung	6	0.97
17	Maluku	7	1.14
18	Maluku Utara	2	0.32
19	Nusa Tenggara Barat	38	6.18
20	Nusa Tenggara Timur	10	1.62
21	Papua	19	3.09
22	Papua Barat	3	0.48
23	Riau	11	1.79
24	Sulawesi Barat	1	0.16
25	Sulawesi Selatan	53	8.63
26	Sulawesi Tengah	16	2.6
27	Sulawesi Tenggara	4	0.65
28	Sulawesi Utara	10	1.62
29	Sumatra Barat	12	1.95
30	Sumatra Selatan	14	2.28
31	Sumatra Utara	6	0.97
32	Yogyakarta	28	4.56
33	Kepulauan Riau	-	0
34	Kalimantan Utara	2	0.32

Tabel diatas menginformasikan bahwa jumlah populasi lulusan Diklat CPTA belum sepenuhnya tersebar secara merata pada setiap daerah. Propinsi Kepulauan Riau yang sama sekali belum memiliki lulusan Diklat CPTA (0%) sebagai calon pejabat fungsional pustakawan keahlian. Adapun 12 provinsi (35.29 %) memiliki jumlah lulusan CPTA dibawah satu persen (1 %) yakni, Provinsi Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Lampung, Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sumatra Utara.

Sedangkan hanya 1 provinsi yang memiliki jumlah lulusan CPTA yang diatas 10 % atau jumlah terbanyak dari pada provinsi lainnya yakni Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 20.68 % (127 orang lulusan). Dari jumlah 127 orang lulusan peserta Diklat CPTA pada Provinsi DKI Jakarta yang tersebar ke berbagai jenis perpustakaan meliputi Perpustakaan Nasional (73 orang), Perpustakaan Khusus/Instansi Pemerintah (47), Perpustakaan Sekolah (2), Perpustakaan Perguruan Tinggi (3), dan Perpustakaan Umum Provinsi (2). Sebanyak 21 Provinsi lainnya masing-masing memiliki kisaran diantara <10 % >

1 %. Jika kita menilik data lulusan Diklat CPTA pada tingkat provinsi seutuhnya masih perlu kita evaluasi bersama secara menyeluruh sehingga penyediaan sumber daya calon pejabat fungsional pustakawan di setiap provinsi tersedia secara merata.

Sebaran populasi jumlah lulusan diklat CPTA yang tersebar ke berbagai daerah, pulau jawa merupakan kepulauan yang memiliki lulusan diklat CPTA yang paling tinggi mencapai 50.16 %, Sumatra (13,51 %), Sulawesi (13,68 %), Kalimantan (3,9 %), Bali (5,53 %), Nusa Tenggara (7,81 %) dan Papua (3,58 %).

4. Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelami	Jumlah/orang	Prosentase
1	Laki – Laki	288	46.90
2	Perempuan	326	53.09
	Jumlah	614	100 %

Berdasarkan jenis kelamin bahwa jumlah lulusan peserta Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli (CPTA) anggaran 2010 s.d 2019 yang terdiri dari perempuan dan laki-laki mempunyai jumlah yang berbeda. Dari table diatas menginformasikan bahwa jumlah peserta berjenis kelamin perempuan memperoleh jumlah yang lebih tinggi dari jumlah peserta Diklat berjenis kelamin laki-laki. Jumlah berjenis kelamin perempuan sebanyak 326 orang (53,09 %) dan sedangkan jumlah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 288 orang (46.90 %). Data tersebut menggambarkan bahwa jumlah kaum perempuan mempunyai potensi yang lebih besar untuk berkarier pada jabatan fungsional pustakawan.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Diklat Fungsional Pustakawan merupakan program Diklat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan jumlah fungsional pustakawan di Indonesia saat ini. Peningkatan akselerasi jumlah fungsional pustakawan melalui penyelenggaraan

DIKLAT Fungsional Pustakawan perlu untuk ditingkatkan sehingga penyediaan tenaga fungsional pustakawan dapat memenuhi kebutuhan atas jumlah perpustakaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui Penyelenggaraan Diklat Calon Pustakawan Tingkat Terampil, Diklat Alih Jalur Fungsional Pustakawan Tingkat Ahli serta penyelenggaraan Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli merupakan solusi pemerintah dalam mengusahakan peningkatan jumlah pustakawan baik Pustakawan Tingkat Keterampilan maupun Pustakawan Tingkat Keahlian.

Usaha peningkatan akselerasi jumlah fungsional pustakawan Tingkat Keahlian melalui penyelenggaraan DIKLAT Calon Pustakawan Tingkat Ahli (CPTA) perlu diimbangi dengan perencanaan yang strategis berdasarkan pada kebutuhan jumlah perpustakaan baik di Pusat maupun di Daerah.

2. SARAN

Perlu adanya peningkatan intensitas jumlah pelaksanaan Diklat Fungsional Pustakawan terutama Diklat Calon Pustakawan Tingkat Terampil (CPTT) dan Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli (CPTA) baik di daerah maupun di pusat sebagai penjangking dalam meningkatkan jumlah fungsional pustakawan baik pustakawan keterampilan maupun pustakawan keahlian.

Perlu adanya evaluasi yang menyeluruh dalam meningkatkan jumlah lulusan peserta Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli pada setiap daerah. Terutama proses rekrutmen calon peserta Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli sehingga tidak terjadi ketimpangan jumlah lulusan peserta Diklat CPTA pada setiap daerah Provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*, Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2009
- Indonesia. *Jabatan Fungsional Pustakawan dan*

- Angka Kreditnya*, Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2015
- Indonesia. *Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pustakawan*, Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2006
- Indonesia. *Road Map 2015-2019 Perpustakaan Nasional RI*, Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2015
- Indonesia. *Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui Penyesuaian/Inpasing*, Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2017
- Indonesia. *Pengendalian Pelaksanaan Diklat : Bahan Diklat Bagi Penyelenggaraan Diklat*, Jakarta : Lembaga Administrasi Negara, 2003
- Daryanto dan Bintoro. *Manajemen Diklat*, Jakarta : Gama Media, 2018
- Mamat Ramlan. *Direktori Calon Pustakawan Tingkat Ahli Indonesia : Alumnus Peserta Pendidikan dan Pelatihan Calon Pustakawan Tingkat Ahli 2011/2017*, Jakarta : Pusdiklat Perpustakaan Nasional RI, 2018
- <http://www.pustakawan.perpusnas.go.id/>